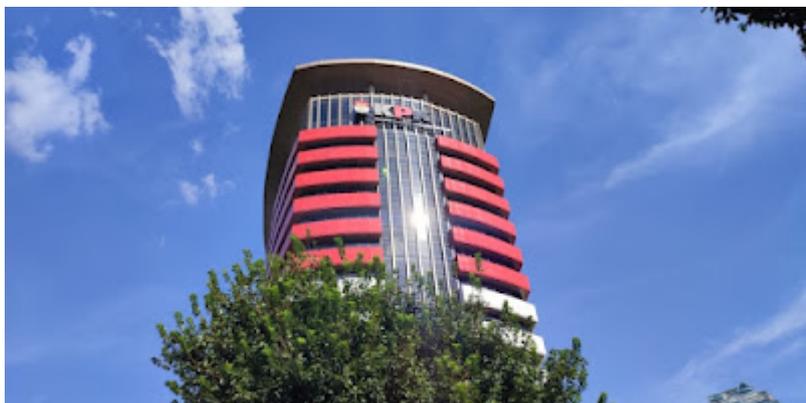


KPK Panggil Tiga Saksi di Kasus Suap Harun Masiku

Category: Hukum

written by Redaksi | 24/01/2025



ORINEWS.id – Tiga orang dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Fraksi [PDIP](#) periode 2019-2024.

Jurubicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hari ini, Jumat, 24 Januari 2025, tim penyidik memanggil tiga orang sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku (HM).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Tessa kepada wartawan, Jumat siang, 24 Januari 2025.

Ketiga saksi yang dipanggil, yakni Julianto Nugroho selaku Kasubbag pada Biro Teknis dan Hupmas [KPU](#), Retno Wahyudiarti selaku Staf [KPU](#), dan Patrick Gerard Masoko selaku swasta.

Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan dua orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Keduanya adalah Hasto Kristiyanto (HK) selaku Sekretaris

Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam ponselnya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan ponselnya yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.[]